

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian tentang aspek-aspek keberhasilan *e-parking* di Kota Bandung ditujukan untuk menjawab pertanyaan : apa saja aspek keberhasilan *e-parking* di Kota Bandung?

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek keberhasilan *e-parking*, peneliti menemukan empat (4) aspek yang menjadi penghambat keberhasilan *e-parking*, yaitu (1) *digital divide*, (2) sumber daya manusia, (3) aturan dan (4) infrastruktur. Berikut ini adalah penjelasan kesimpulan terhadap 4 tidak berhasilnya *e-parking* tersebut.

6.1.1 *Digital divide*.

E-parking tidak berhasil karena adanya gap dalam penguasaan digital (*digital divide*) yang besar. Dalam penelitian ini penguasaan digital diukur dari dua aspek yaitu (1) keterampilan menggunakan *e-parking* (2) motivasi masyarakat menggunakan *e-parking*.

Dalam penelitian ini keterampilan dimaknai sebagai pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penggunaan *e-parking*, sedangkan motivasi dimaknai sebagai kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran parkir tepi jalan. Berikut ini adalah tabel ringkasan temuan dua ukuran *digital divide* tersebut:

Tabel 6. 1 Persentase Pemahaman Masyarakat dalam Penggunaan E-Parking

Keterampilan (Pemahaman Digital) (100 Narasumber)		
Paham (penggunaan <i>e-parking</i> – 1 pertanyaan)	Jumlah Rata-Rata Pemahaman (mekanisme penggunaan <i>e-parking</i> – 6 pertanyaan)	Tidak paham
38%	77,83%	62%

Tabel 6. 2 Persentase Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan E-Parking

Motivasi (Kesadaran Membayar Parkir Tepi Jalan) (100 Narasumber)		
Paham (38%)	Menyadari	17%
	Tidak Menyadari	21%
Tidak Paham (62%)	Menyadari	25%
	Tidak menyadari	37%

Berikut ini adalah penjelasan dua hal tersebut :

6.1.1.1 Keterampilan Masyarakat.

Keterampilan masyarakat diukur dari tingkat pemahaman masyarakat dalam penggunaan *e-parking*. Rata-rata pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penggunaan *e-parking* hanya sebesar 77,83%. Hal tersebut dapat terlihat dari faktor sebagai berikut :

- Masyarakat hanya mengandalkan juru parkir.
- Masyarakat tidak terbiasa menggunakan *e-parking* ketika tidak diarahkan oleh juru parkir.
- Pemerintah tidak mengadakan sosialisasi yang lengkap mengenai

mekanisme penggunaan mesin *e-parking* dan manfaat yang diperoleh ketika menggunakan *e-parking*. Hal ini disebabkan karena pesimisme pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan *e-parking*.

6.1.1.2 Motivasi Masyarakat

Motivasi masyarakat diukur dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar parkir. Kesadaran masyarakat dalam membayar parkir memengaruhi tingkat penggunaan *e-parking*. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah masyarakat yang tidak menyadari pentingnya membayar parkir adalah tinggi, yaitu 55%. Angka sebesar 55% ini merupakan penjumlahan dari 21% masyarakat yang tidak sadar tentang membayar parkir tepi jalan dan 34% masyarakat yang tidak paham tentang penggunaan *e-parking* dan tidak sadar tentang membayar parkir tepi jalan. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan triangulasi terhadap temuan tingkat keterampilan masyarakat dalam penggunaan *e-parking*.

Tingginya tingkatan masyarakat (55%) yang tidak menyadari pentingnya membayar parkir tepi jalan tersebut dapat terlihat dari faktor sebagai berikut:

- Petugasnya sebagai pengelola dan pelaksana tidak memberikan contoh untuk menggunakan *e-parking* dengan tidak membayar parkir menggunakan *e-parking*.
- Masyarakat memiliki aktivitas yang menyebabkan tidak dapat menyempatkan membayar parkir tepi jalan menggunakan *e-parking*.
- Masyarakat tidak memiliki *e-money* sebagai alat pembayaran parkir menggunakan *e-parking*.

- Masyarakat mengalami *technophobia*, diantaranya: masyarakat mengalami ketakutan ketika menggunakan teknologi, dan masyarakat tidak percaya bahwa dengan membayar parkir menggunakan *e-parking* dapat memperoleh keuntungan.

6.1.2 Sumber Daya Manusia.

E-parking tidak berhasil karena sumber daya manusia yang rendah. Pengukuran sumber daya manusia didasarkan pada (1) kualitas tanggung jawab & kuantitas juru parkir dan (2) capaian target pendapatan.

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas tanggung jawab rendah yaitu sebesar 27%, dan kuantitas juru parkir buruk. Buruknya kuantitas juru parkir dilihat dari 445 mesin yang tidak dijaga oleh juru parkir terdapat sebanyak 21% (95 mesin). Sumber daya manusia dengan kualitas tanggung jawab yang rendah dan kuantitas yang buruk menyebabkan lebih dari 90% target pendapatan tidak tercapai. Berikut adalah penjelasan dari dua hal sebagai berikut :

6.1.2.1 Kualitas dan kuantitas juru parkir.

Kualitas tanggung jawab yang rendah dan kuantitas juru parkir yang buruk dapat disebabkan dari faktor sebagai berikut:

- Sebanyak 73% persepsi masyarakat menunjukkan bahwa juru parkir tidak aktif dalam mengarahkan, dan memberitahu mekanisme penggunaan *e-parking*.
- Juru parkir tidak proaktif dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran pada Pasal 14 ayat 1 dengan tidak mengarahkan dan memberikan

pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir tepi jalan.

- Adanya resistensi yang dihadapi UPT Parkir Dinas Perhubungan sehingga memberikan tugas yang keliru dengan membuat juru parkir tidak mengarahkan masyarakat untuk menggunakan *e-parking*.
- UPT Parkir Dinas Perhubungan tidak memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga menyebabkan terdapat mesin yang tidak dijaga oleh juru parkir. Hal ini menyebabkan 21% potensi capaian pendapatan tidak terealisasi.

6.1.2.2 Capaian target pendapatan.

Target pendapatan retribusi parkir yang diperoleh dari mesin *e-parking* tidak tercapai yang disebabkan karena faktor sebagai berikut :

- Juru parkir tidak memperhatikan durasi kendaraan yang parkir di tepi jalan.
- Tidak adanya pengawasan terhadap juru parkir yang menyebabkan juru parkir melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut dilakukan dengan tidak menyetorkan seluruh pendapatan sehingga justru terjadi kebocoran retribusi parkir.
- Kecurangan yang dilakukan oleh juru dianggap sebagai reward oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan.

6.1.3 Aturan

E-parking tidak berhasil karena tidak adanya dasar hukum ataupun langkah strategis yang menjadi pedoman implementasi *e-parking*. Kesimpulan ini diperoleh dari faktor sebagai berikut :

- Tidak ditemukannya teknis pelaksanaan *e-parking* dan yang mengatur tentang *e-parking*.
- Pengadaan *e-parking* tidak berdasarkan pada buku panduan penyusunan *master plan smart city* Kota Bandung. E-parking mulai aktif digunakan pada juli 2017, sedangkan buku Panduan Penyusunan *Master plan Smart city* baru diterbitkan pada tanggal 10 juli 2017.
- Pengadaan *e-parking* tidak berdasarkan pertimbangan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi Kota Bandung.
- Adanya pemutusan kontrak oleh pemerintah dengan penyedia dan operator mesin *e-parking*.

6.1.4 Infrastruktur

E-parking tidak berhasil karena kondisi mesin *e-parking* tidak memadai sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan *e-parking*. Dalam penelitian ini kondisi infrastruktur diukur dari 2 aspek (1) Pemeliharaan infrastruktur dan (2) Ketersediaan infrastruktur.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya pemeliharaan terhadap mesin *e-parking* sehingga memengaruhi ketersediaan mesin *e-parking*. Ketiadaan pemeliharaan mesin *e-parking* menimbulkan mesin *e-parking* yang error dan rusak.

6.1.4.1 Pemeliharaan infrastruktur

UPT Parkir Dinas Perhubungan tidak memelihara mesin, yang terlihat karena faktor sebagai berikut :

- Tidak ada bidang teknis khusus yang memperbaiki mesin *e-parking*.

- UPT Parkir Dinas Perhubungan hanya mendata mesin yang mengalami kerusakan namun tidak melakukan perbaikan pada mesin *e-parking* yang rusak.
- Pemeliharaan yang dilakukan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan adalah dengan meminta bantuan kewilayahan seperti RT, RW, maupun Kecamatan.

6.1.4.2 Ketersediaan Infrastruktur (Mesin *E-Parking*)

Tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan memengaruhi ketersediaan infrastruktur sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat menggunakan *e-parking*.

- Masyarakat tidak dapat menggunakan mesin *e-parking* yang rusak, dan masyarakat tidak bersedia untuk menggunakan mesin parkir lainnya meskipun telah ada pemberitahuan mesin *e-parking* tersebut mengalami kerusakan dan bisa menggunakan mesin *e-parking* yang berada di titik terdekat.
- Mesin *e-parking* masih sesuai dengan jumlah yang tercatat. Mesin *e-parking* yang hilang terjadi karena mesin *e-parking* direlokasi bukan hilang. Sayangnya, komponen mesin *e-parking* tidak direlokasi dengan lengkap dan tidak ada informasi mengenai relokasi dan lokasi baru mesin *e-parking* tersebut direlokasi sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada mesin *e-parking*.

6.2 Saran

Tujuan dari *e-parking* adalah merealisasikan potensi peningkatan PAD melalui retribusi parkir dari masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan *e-parking* yaitu meningkatkan PAD ternyata tidak tercapai. Karena tujuan dari *e-parking* tidak tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *e-parking* melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tidak berhasil.

Penelitian ini berhasil mengungkap empat aspek yang menyebabkan *e-parking* di Kota Bandung tidak berhasil. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi bahwa upaya perbaikan pengelolaan *e-parking* di Kota Bandung perlu memperhatikan 4 aspek hambatan keberhasilan *e-parking* tersebut. Apabila keempat aspek yang telah teridentifikasi menghambat keberhasilan *e-parking* tersebut dikelola dan dicarikan solusi maka diharapkan *e-parking* Kota Bandung akan mencapai tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *e-government* harus memiliki peta rencana. Sedangkan hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi *e-parking* tidak didasarkan pada aturan yang berkaitan dengan perumusan master plan maupun grand strategy. Dalam perspektif Administrasi Publik, aturan menjadi aspek yang penting sebagai dasar implementasi suatu kebijakan. Sehingga, peneliti memberikan rekomendasi agar aturan menjadi aspek utama yang mendesak untuk perlu di perbaiki. Rekomendasi perbaikan pada aspek aturan akan berpengaruh pada keberhasilan dari ketiga aspek lainnya. Maka dari itu, saran dari

peneliti adalah melakukan pengkajian ulang aturan, dengan melengkapi perencanaan dan merumuskan langkah strategis yang disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi oleh *e-parking*, aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung (RENSTRA). Dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak adanya pembahasan mengenai perencanaan agar *e-parking* menjadi berhasil. Maka dari itu saran perubahan renstra yang diusulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- A. Merencanakan sosialisasi rutin kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas UPT Parkir Dinas Perhubungan.

- Sosialisasi mengenai mekanisme penggunaan *e-parking*.

Sosialisasi mengenai mekanisme penggunaan *e-parking* dilakukan untuk mengatasi hambatan dari masyarakat yang tidak paham dalam mekanisme penggunaan *e-parking*. Saran ini didasarkan pada hasil temuan yang menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman dari masyarakat yang mengaku paham mengenai penggunaan *e-parking* hanya sebesar 77.83%.

- Sosialisasi mengenai manfaat menggunakan *e-parking*.

Sosialisasi mengenai manfaat penggunaan *e-parking* dilakukan untuk mengatasi hambatan dari masyarakat yang mengalami technophobia (tidak merasakan efek yang menguntungkan) dimana masyarakat merasa tidak diuntungkan ketika membayar parkir menggunakan *e-parking*.

- B. Merencanakan pelatihan dan pembinaan terhadap juru parkir. Pelatihan dan pembinaan diberikan kepada juru parkir agar juru parkir menjadi lebih proaktif. Hal ini dilakukan agar juru parkir selalu mengarahkan masyarakat yang tidak memiliki e-money, masyarakat yang terburu-buru, dan masyarakat yang mengalami technophobia (ketakutan pada teknologi).
- C. Merencanakan Pelatihan kepada UPT Parkir Dinas Perhubungan. Pelatihan ini dilakukan mengubah pola pikir petugas yang mengalami resistensi terhadap perubahan budaya kerja berbasis elektronik.
- D. Merencanakan perbaikan hubungan dengan pihak operator atau mencari dan menyediakan bidang khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan *e-parking*. Bidang khusus tersebut berperan sebagai operator. Saran ini berdasarkan pada hasil temuan bahwa hubungan yang tidak baik dengan pihak operator *e-parking* menyebabkan tidak adanya pengawasan terhadap data pemasukan pendapatan parkir tepi jalan menggunakan *e-parking* sehingga terjadi hilangnya pendapatan retribusi parkir tepi jalan menggunakan *e-parking*. Selain itu bidang khusus tersebut juga berperan sebagai teknisi pemeliharaan *e-parking*, berdasarkan pada hasil temuan mesin *e-parking* tidak terpelihara sejak awal pengadaan mesin *e-parking* yang dapat memengaruhi kondisi mesin *e-parking* sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan *e-parking*.

2. Memberikan rekomendasi perubahan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran

- A. Pasal 14 Ayat 1. Penambahan poin bahwa kewajiban juru parkir bukan hanya memberikan pelayanan tapi juga sebagai pengawas kendaraan yang melanggar untuk dilaporkan kepada UPT Parkir Dinas Perhubungan. Saran ini berdasarkan pada hasil temuan bahwa terdapat sebanyak 58% masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar parkir tepi jalan. Sanksi dilakukan agar masyarakat sadar untuk melakukan pembayaran parkir tepi jalan. Sanksi yang diusulkan peneliti adalah melakukan penderekan kendaraan lalu pemilik dikenai denda(sanksi seperti ini telah dilaksanakan di DKI Jakarta¹⁷⁹), sedangkan alternatif sanksi yang diusulkan oleh peneliti adalah memborgol kendaraan lalu dikenai denda. Denda tersebut akan masuk ke dalam retribusi parkir tepi jalan. Sanksi tersebut akan mengubah pola pikir masyarakat untuk patuh pada hukum dengan membayar parkir tepi jalan menggunakan *e-parking*.
- B. Pasal 14 ayat 1. Penambahan kewajiban juru parkir adalah menyetorkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari kendaraan yang parkir di tepi jalan. Pemberian sanksi dilakukan kepada juru parkir yang melanggar. Sanksi yang diusulkan oleh peneliti adalah penangguhan gaji juru parkir. Sedangkan alternatif sanksi yang diusulkan adalah mutasi juru parkir ke lokasi yang tidak ramai.

¹⁷⁹Faizal Fanani, *Ini Cara Urus Kendaraan yang Terkena Razia Parkir Liar*, <https://www.liputan6.com/news/read/2103198/ini-cara-urus-kendaraan-yang-terkena-razia-parkir-liar> diakses pada 2 Januari 2020 Pukul 19. 31 WIB

- C. Pasal 14 ayat 2, Penambahan ayat yang mengatur insentif untuk juru parkir. Bahwa insentif diberikan kepada juru parkir ketika target pendapatan yang ditetapkan pemerintah tercapai.
 - D. Pasal 16 ayat 2 mengenai karcis parkir. Karcis parkir bukan diberikan kepada pengguna *e-parking*, tetapi ditempelkan pada kendaraan yang parkir tepi jalan sehingga juru parkir mengetahui durasi kendaraan yang parkir lalu pengguna membayar tarif parkir sesuai dengan durasi parkir.
3. Membuat dan mengkaji *master plan* sesuai dengan buku pedoman penyusunan *master plan smart city*.
- A. *Master plan* memuat pengaturan mengenai kuantitas juru parkir, juru parkir manual mulai harus menjaga mesin *e-parking* sehingga tidak ada mesin *e-parking* yang tidak dijaga oleh juru parkir. Hal ini didasarkan pada hasil temuan sebanyak 21% mesin tidak dijaga oleh juru parkir.
 - B. Koordinator lapangan yang bertanggung jawab mengawasi setiap mesin *e-parking* melakukan pengawasan setiap hari memastikan bahwa juru parkir tidak melakukan kecurangan saran ini diusulkan agar saran nomor 2 poin b dapat diberlakukan.
4. Melengkapi strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengenai relokasi mesin *e-parking*. UPT Parkir Dinas Perhubungan merelokasi mesin dengan komponen yang lengkap sesuai pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun

2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran pasal 5 ayat 1 Penyelenggaraan parkir dengan dipasang tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan marka parkir.

Saran penelitian mengenai aturan sebagai aspek utama yang perlu diperbaiki ditunjukkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan agar tujuan *e-parking* mencapai keberhasilan. Selain saran mengenai aspek aturan yang akan mempengaruhi ketiga aspek lainnya, berdasarkan hasil temuan penelitian peneliti menemukan temuan aspek-aspek penting lainnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran bahwa temuan pada aspek baru yang sudah diidentifikasi oleh peneliti, dapat menjadi agenda untuk penelitian lanjutan. Temuan aspek tersebut antara lain (1) investasi strategis, (2) kolaborasi, (3) edukasi & promosi, dan (5) korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansell, C, Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Oxford University Press
- Armin Trost. 2018. *Human Resources Strategies : Balancing Stability and Agility in Times of Digitization*. German: Springer-Verlag GmbH Deutschland.
- Christopher G. Reddick (ed). 2010. *Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery*. USA: IGI Global snippet.
- Kristi Poerwandari. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Esharenana E. Adomi, (ed). 2010. *Frameworks for ICT Policy: Government, Social and Legal Issues*. United States: IGI Global.
- Gedro Julie. 2017. *Identity, Meaning, and Subjectivity in Career Development: Evolving Perspectives in Human Resources*. New York : Springer International Publishing.
- Haroon A. Khan. 2018. *Globalization and the Challenges of Public Administration: Governance, Human Resources Management, Leadership, Ethics, E-Governance and Sustainability in the 21st Century*. Switzerland: Springer Nature.
- InfoDev and The Center of Democracy and Technology. 2002. *The E-government Handbook for Developing Countries*, Washington DC: World Bank.
- Irham Fahmi. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan : Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta.
- Jessamyn C. West. 2011. *Librarians Bridging the Digital Divide*. US: Libraries Unlimited (An Imprint of ABC-CLIO, LLC).
- KimAndreasson (Ed). 2015. *Digital Divides: The New Challenges And Opportunities of E-Inclusion*. United States of America: CRC PRESS.

- Laura Alcaide Muñoz, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar (eds). 2018. *International E-Government Development: Policy, Implementation and Best Practice*. Palgrave Macmillan.
- M. Naveed Baqir, Lakshmi Iyer, Christopher G. Reddick (ed). 2010. *Comparative E-Government*. New York: Springer-Verlag.
- Margaret C. Harrell, Melissa A. Bradley. 2009. *Data Collection Method: Semi-Structured Interviews and Focus Group*. RAND Corporation.
- McMillan J. H., & Schumacher S. 2001. *Research in education: A conceptual introduction (5th ed.)*. New York: Longman.
- Michael A. Crumpton. 2015. *Strategic Human Resource Planning for Academic Libraries: Information, Technology, and Organization*. United Kingdom: Elsevier Ltd.
- Moleong Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Nigel Mathers, Nick Fox, Amanda Hunn. 1998. *Trent Focus for Research and Development in Primary Health Care : Using Interviews in a Research Project*. Trent Focus Group.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2013. *OECD e-government studies : Egypt 2012*. OECD Publishing.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2005. *Reaping the Benefits of ICTs in Spain: Strategic Study On Communication Infrastructure And Paperless Administration*. OECD Publishing.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2009. *Rethinking e-Government Services: User-Centred Approaches*. OECD Publishing.
- Paul Henman. 2010. *Overning Electronically: E-governmenternment and the Reconfiguration of Public Administration, Policy and Power*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

- Rudra Pradhan, Girijasankar Mallik, Tapan P. Bagchi. *Information communication technology infrastructure and economic growth: a causality evinced by cross-country panel data.*
- Sharan B. Merriam, Elizabeth J. Tisdell. 2015. *Qualitative Research A Guide To Design And Implementation.* Jossey-Bass.
- Stephen E. Condrey, (Ed). 2005. *Handbook of Human Resource Management in Government.* San Francisco: Jossey-Bass.
- Steven J. Jackson, Alex Pompe, dan Gabriel Grishok. *Maintenance, Repair, and Technology for Education Initiatives in Rural Namibia.*
- Subhash, Bhatnagar. 2009. *Unlocking E-government Potential.* New York: Sage Publications Pvt. Ltd.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Thomas Ludwig. 2017. *Researching Complex Information Infrastructures Design Characteristics of ICT Tools for Examining Modern Technology Usage.* Germany: Springer Nature.
- Ulber Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika adhitama.
- Usman Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial.* Bumi Aksara, 1998.
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Fajar Interpratama.

Jurnal

- Ahmed Al-Omari and Hussein Al-Omari. "E-Government Readiness Assessment Model. " *Jurnal Computer Science*, (2) 2006: 842.
- Heriyanto Meyzi. "E-Government dan Pemasaran Kota. " *Jurnal Industri dan Perkotaan*, (8) 2003: 667.
- Jaime Campos. "Development In The Application Of ICT In Condition Monitoring And Maintenance. " *Journal of computers in industry*, (60) 2009: 17.

Mila Gasco. "Exploring The E-Government Gap In South America. International. " *Journal of Public Administration*, (28) 2006: 695.

Manoj Kumar Sharma dan Miss. Shilpa Jain, *Management and Business Studies, Leadership Management: Principles, Models and Theories*, Global journa; of management and business studies (GJMBS), 2013 : 3

Nurani Fitri Kireina. "Mesin Parkir Elektronik Sebagai Wujud dari Smart City Di Kota Bandung. " *jurnal JISPO*, (7) 2017: 78.

Pratheepkanth Puwanenthiren. "Reward System and Its Impact on Employee Motivation in Commercial Bank of Sri Lanka. " *Journal of Management and Business Research*,(11) 2011: 84.

Sosiawan Edwi Arief. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. " *Jurnal SemnasIF*, (1) 2008: 106.

Van Dijk Jan A. G. M. "Digital divide research, achievements and shortcomings. " *Journal of Poetics*, (34) 2006: 226.

Zainal Arifin Hasibuan. "Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda. " *Jurnal Sistem Informasi MTI UI*, (2) 2007: 70.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir

Rujukan yang disajikan dalam Seminar

Stevanus Wisnu Wijaya, dan Kridanto Surendro, (2006) *Kajian Teoritis: Model E-government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Dan Keberhasilan E-government*, makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 17 Juni 2006.

Zainal Arifin Hasibuan, dan Harry B. Santoso, (2005) *Standarisasi Aplikasi E-government Untuk Instansi Pemerintah*. Makalah yang disajikan dalam Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia ITB, 3-4 Mei 2005.

Website

Bagian kerja sama Kota Bandung. *Smart City*. <http://kerja.sama.bandung.go.id/profil/smart-city> (diakses September 19, 2018).

Dendi Ramdhani. *Telan Dana Rp 80 Miliar, Ratusan Mesin Parkir di Bandung Belum Berfungsi*. 25 4 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/04/25/15161991/telan.dana.rp.80.miliar.ratusan.mesin.parkir.di.bandung.belum.berfungsi> (diakses September 19, 2018).

Depi Gunawan. *Juru Parkir Resmi di Bandung Barat Dilengkapi Seragam*. 15 November 2018. <http://mediaindonesia.com/read/detail/198143-juru-parkir-resmi-di-bandung-barat-dilengkapi-seragam> (diakses Januari 22, 2019).

Digital Watch Observatory. *Strategies for Overcoming The Digital Divide*. t. thn. <https://dig.watch/issues/digital-divide> (diakses September 6, 2019).

Dunamis Organization Services. *Pemimpin yang Proaktif*. t. thn. <http://www.dunamis.co.id/product/article/31> (diakses Januari 28, 2020).

Faizal Fanani. *Ini Cara Urus Kendaraan yang Terkena Razia Parkir Liar*. t. thn. <https://www.liputan6.com/news/read/2103198/ini-cara-urus-kendaraan-yang-terkena-razia-parkir-liar> (diakses Januari 2, 2020).

Mochamad Solehudin. *Begini Cara Menggunakan Mesin Parkir Elektronik di Bandung*. 14 Juli 2017. <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Barat/D-3560522/Begini-Cara-Menggunakan-Mesin-Parkir-Elektronik-Di-Bandung> (diakses September 19, 2018).

Muhammad Fikry Mauludy. *Juru Parkir Minta Perlindungan*. 6 Mei 2018. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/05/06/juru-parkir-minta-perlindungan-423900> (diakses September 19, 2018).

Tiah SM. *Hati-Hati Parkir Sembarangan, Dishub Kota Bandung Siapkan Ratusan Ribu Stiker yang Sulit Dibuka*. 1 february 2017. <http://jabar.tribunnews.com/2017/02/01/hati-hati-parkir-sembarangan-dishub-kota-bandung-siapkan-ratusan-ribu-stiker-yang-sulit-dibuka> (diakses September 2018, 19).